

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL  
DI KABUPATEN ACEH JAYA**



**Disusun Oleh :**

**T. DINAL AHYA  
NIM. 170604071**

**PROGAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : T. Dinal Ahya  
NIM : 170604071  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2022

Yang Menyatakan,



T. Dinal Ahya

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**  
**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

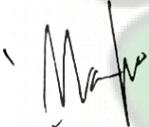
**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Kabupaten Aceh Jaya**

Disusun Oleh:

T. Dinal Ahya  
NIM.170604071

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam menyelesaikan studi  
pada Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Idarvani, SE., M.Si  
NIDN. 0105057503

Pembimbing II



Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIDN. 0122078601

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten Aceh Jaya

T. Dinal Ahya  
NIM. 170604071

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu  
Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Januari 2022  
12 Jumadil Akhir 1443H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

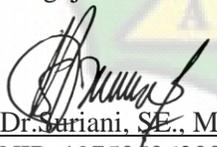
Sekretaris

  
Dr. Idaryani, S.E., M.Si  
NIDN : 0105057503

  
Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIDN : 2025027902

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Sariyani, SE., M.Si  
NIP. 197505062006042001

  
A. Rahmat Adi, SE., M.Si  
NIDN. 2025027902

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: llibrary@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : T. Dinal Ahya

NIM : 170604071

Fakultas/Jurusan : Ekonomi-dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

E-mail : 170604071@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir

KKU

Skripsi

Yang berjudul:

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Kabupaten Aceh Jaya** Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 02 Juni 2022

Mengetahui

Penulis

T. Dinal Ahya  
NIM. 170604071

Pembimbing I

Dr. Idaryani, SE., M.Si  
NIDN. 0105057503

Pembimbing II

Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIDN. 0122078601

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha ESA yang tiada hentya memberi rahmat dan anugerah berkat, Serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten Aceh Jaya”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah syarat guna memperoleh gelar Sarjan Strata I pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu berupa isi atau materi susunan kalimatnya, untuk itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini selanjutnya.

Pada Kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan bimbingan pada penyusunan proposal skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ibu Marwiyati, SE., MM, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Idaryani, SE., M.Si, selaku Pembimbing I dan Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M.Si Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Dr. Suriani, SE., M.Si selaku penguji I dan A. Rahmat Adi, S.E., M.Si selaku penguji II, terimakasih telah memberikan masukan dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Marwiyati, S.E., M.M. sebagai penasehat akademik (PA) yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian penelitian ini, serta kepada Dosen-dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terima Kasih Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Jaya yang telah memberikan dan

mengizinkan penulis untuk memfasilitasi pada data Pendapatan Asli daerah, Pengeluaran Pembangunan, dan Pertumbuhan Ekonomi.

8. Terima Kasih Kepada Bappeda Kabupaten Aceh Jaya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua Orangtua saya yang telah memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi kepada penulis untuk mampu menyelesaikan program studi ini.
10. Kepada teman-teman perkuliahan, teman-teman Ilmu Ekonomi yang telah membantu, memberikan motivasi agar penulisan ini dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang dapat membangun dan bermanfaat bagi berbagai pihak sangat diharapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan Ilmu Ekonomi dan masyarakat terkait khususnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2022  
Penulis,

T. Dinal Ahya

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:158 Tahun 1987

Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : T. Dinal Ahya  
NIM : 170604071  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  
Pengeluaran Pembangunan, terhadap Pertumbuhan  
Ekonomi Regional Kabupaten Aceh  
Jaya  
Tebal Skripsi : 120 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Idaryani SE., M.Si  
Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

Pembangunan pada suatu wilayah merupakan komponen yang menyeluruh melalui ekspansi atau pembangunan nasional yang dikerjakan melalui dasar otonomi daerah. Hal ini dituang dalam peraturan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggara otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya dan berapa besar pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Jaya dan Bappeda Kabupaten Aceh Jaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini data *Time Series* tahunan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah dan Pengeluaran Pembangunan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pembangunan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya.

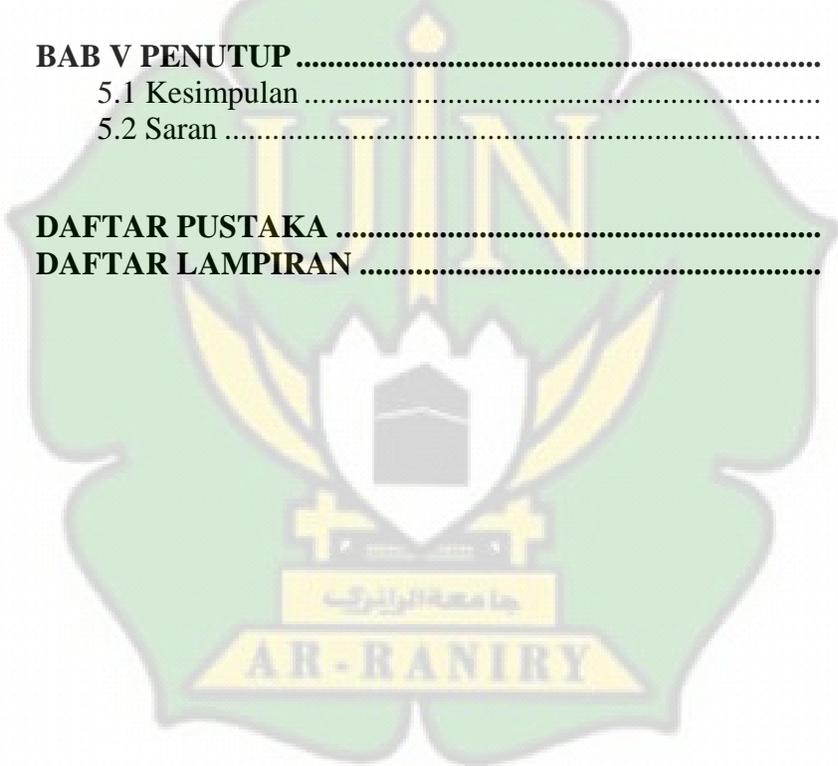
**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	17
2.1.1 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.1.2 Teori Pertumbuhan Solow .....	21
2.1.3 Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi .....	23
2.1.4 Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Regional .....	25
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	26
2.1.6 Teori Metode Perhitungan PDRB .....	30
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	33
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	33
2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	36
2.2.3 Peranan Pendapatan Asli Daerah.....	40
2.3 Pengeluaran Pembangunan .....	42
2.3.1 Pengertian Pengeluaran Pembangunan.....	42

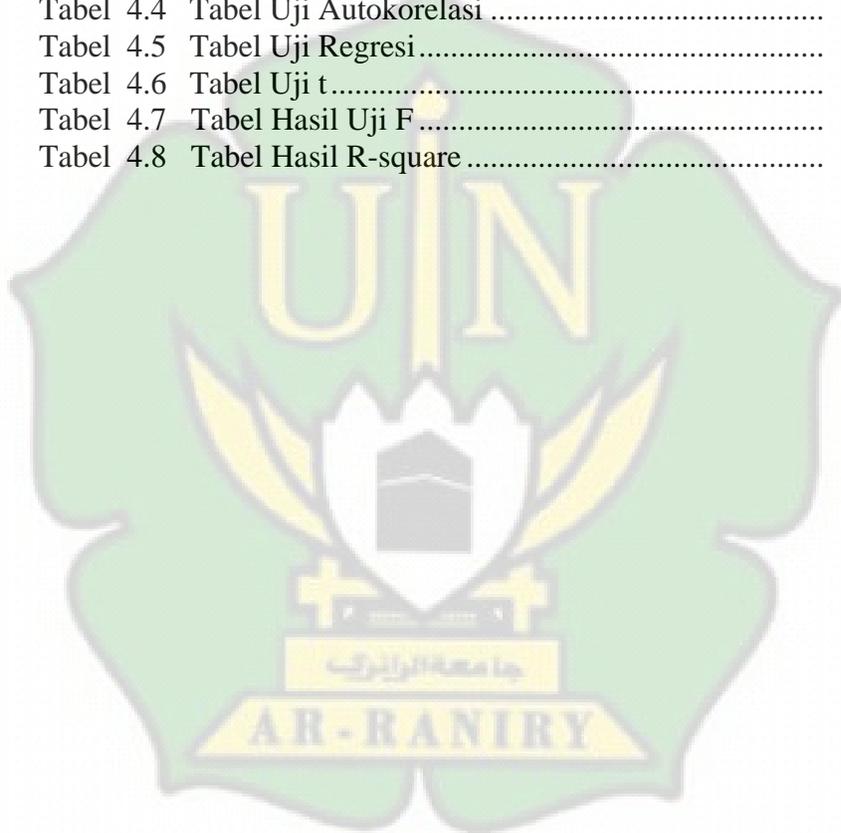
2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pengeluaran Pembangunan .....	45
2.3.3 Klasifikasi Pengeluaran Pembangunan .....	46
2.3.4 Teori Pengeluaran Pembangunan secara mikro ..	48
2.3.5 Teori Pengeluaran Pembangunan secara makro..	48
2.4 Hubungan Antar Variabel .....	52
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	52
2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	54
2.5 Penelitian Terdahulu .....	55
2.6 Kerangka Berfikir .....	65
2.7 Hipotesis .....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
3.1 Desain Penelitian .....	71
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	71
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.4 Definisni dan Operasionalisasi Variabel .....	72
3.5 Model Penelitian .....	74
3.6 Teknik Analisis Data .....	75
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	76
3.7 Uji Koefisien Determinasi .....	79
3.8 Pengujian Hipotesis .....	79
3.8.1 Uji Simultan (Uji F) .....	79
3.8.2 Uji Parsial (Uji t).....	80
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
4.1 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian .....	81
4.2 Deskripsi Penelitian .....	83
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	83
4.2.2 Pengeluaran Pembangunan.....	84
4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	86
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	87
4.3.1 Uji Normalitas .....	87
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	88
4.3.3 Uji Heterokedastisitas.....	89
4.3.4 Uji Autokorelasi .....	90

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	91
4.5 Pengujian Hipotesis .....	93
4.5.1 Uji Parsial (Uji t) .....	93
4.5.2 Uji Simultan (Uji F).....	95
4.5.3 Koefisien Determinasi (R square) .....	96
4.6 Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	97
4.6.1 Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	97
4.6.2 Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>



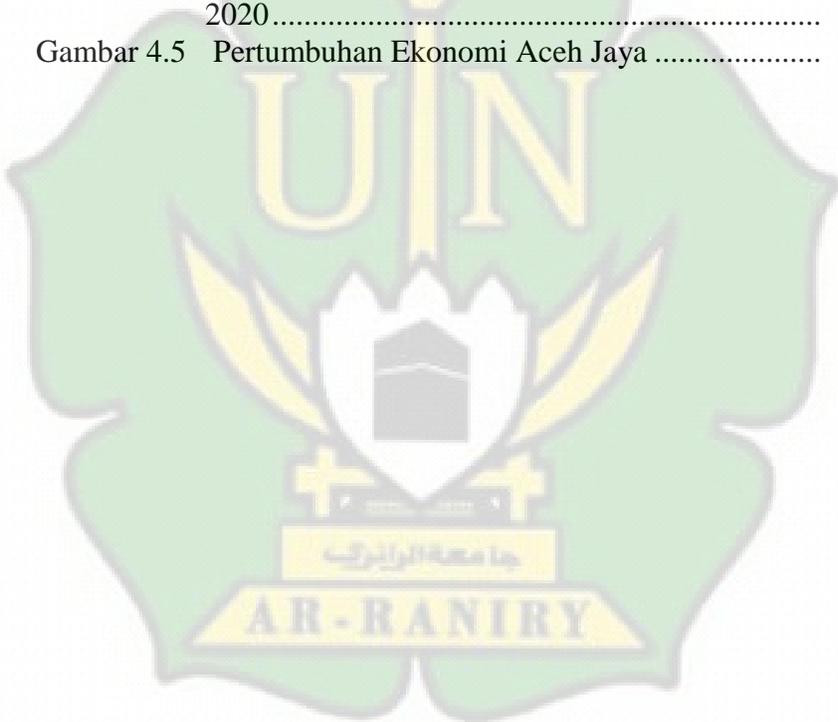
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	62
Tabel 3.1	Operasional Variabel .....	73
Tabel 4.1	Tabel Uji Normalitas .....	88
Tabel 4.2	Tabel Uji Multikolinearitas .....	89
Tabel 4.3	Tabel Uji Heterokedastisitas .....	90
Tabel 4.4	Tabel Uji Autokorelasi .....	91
Tabel 4.5	Tabel Uji Regresi .....	92
Tabel 4.6	Tabel Uji t .....	94
Tabel 4.7	Tabel Hasil Uji F .....	95
Tabel 4.8	Tabel Hasil R-square .....	96



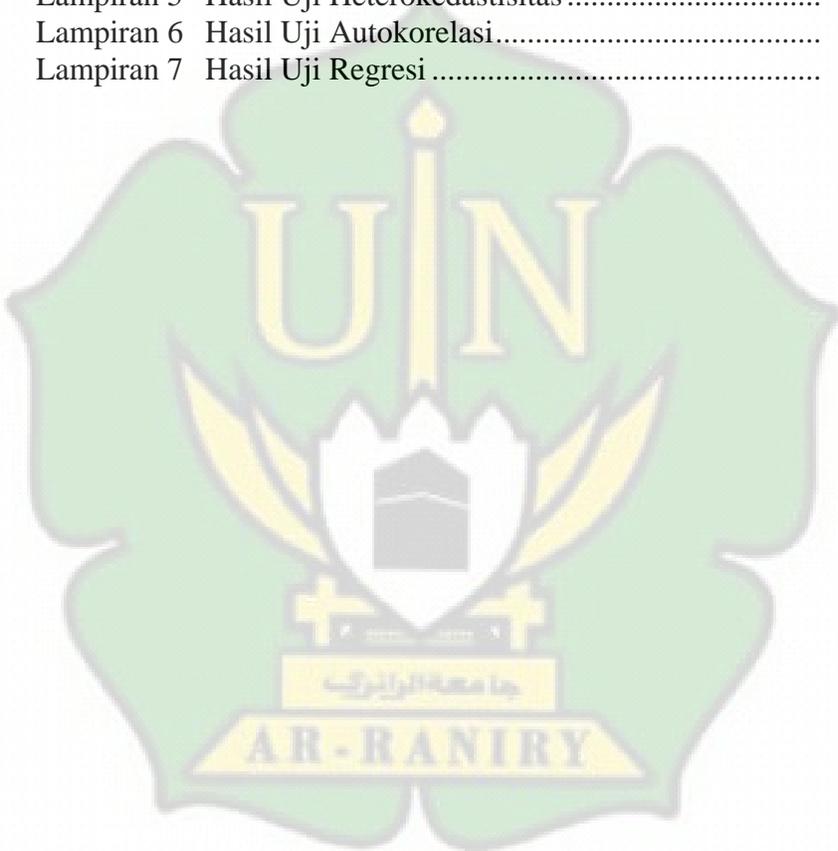
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jaya.....	6
Gambar 1.2	Jumlah PAD Aceh Jaya.....	8
Gambar 1.3	Jumlah Pengeluaran Pembangunan Aceh Jaya ..	11
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	69
Gambar 4.1	Peta Wilayah Aceh Jaya.....	81
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Aceh Jaya.....	82
Gambar 4.3	PAD Aceh Jaya 2005-2022.....	84
Gambar 4.4	Pengeluaran Pembangunan Aceh Jaya 2005 2020.....	85
Gambar 4.5	Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jaya.....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian .....	111
Lampiran 2	Data Interpolasi .....	112
Lampiran 3	Hasil Uji Normalitas.....	115
Lampiran 4	Hasil Uji Multikolinearitas .....	116
Lampiran 5	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	117
Lampiran 6	Hasil Uji Autokorelasi.....	118
Lampiran 7	Hasil Uji Regresi .....	119



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Bahwa dengan adanya proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu diharapkan supaya adanya perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sedangkan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan keamanan. Artinya serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. (Fahrurrazy, 2009:11).

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya

yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Urusan pemerintahan daerah dimaksud meliputi : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya sendiri.

Selanjutnya sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui otonomi daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian agar terciptanya kesejahteraan masyarakat khususnya sebagai kontribusi pada kesejahteraan nasional umumnya dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terencana, terarah dan berkesinambungan berdasarkan pada pedoman RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten), Renstrada (Rencana Strategi Lima Tahun Daerah) dan Renja (Rencana Kerja Tahunan Daerah). Dengan demikian suatu daerah sangat memerlukan beragam data yang dijadikan sebagai acuan dasar, baik dalam penyusunan evaluasi pembangunan ekonomi di daerah

yang telah dilaksanakan maupun dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang.

Pembangunan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan dan meratakan pembangunan di Indonesia maka pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Suatu daerah memerlukan sumber-sumber keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah yang paling penting yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan proses administrasi dan layanan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peningkatannya selalu diharapkan. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Nilawati (2019).

Dengan adanya UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas pada pemerintah daerah untuk mengelola 2 wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh

potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah. Dengan ini, diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya kedaerahan seperti kurangnya lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Demikian juga halnya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada Pertumbuhan Ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat semakin meningkat dengan hadirnya pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingam, 2007:57). Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian

baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era Desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi di daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Arsyad (2015:12). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten Aceh Jaya**  
**Tahun 2005-2020**



*Sumber: BPS, BPKK, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021*

Berdasarkan pada Pendapatan Regional Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020, dapat diketahui bahwa program-program yang dijalankan pemerintah daerah telah menunjukkan hasil yaitu berdasarkan pada penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi yang tercatat di Kabupaten Aceh Jaya selama enam belas tahun dari 2005-2020 yaitu pada tahun 2005 sebesar 2.50% dan 2006 sebesar 2,66%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya hingga tahun 2007 yaitu 2,95%, pada tahun 2008 meningkat sebesar 4,24%, sedangkan untuk tahun 2009 dan 2010 masing-masing 4,13% dan 4,61%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 4,44%, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 4,11%, hingga pada tahun 2013 naik dari

tahun sebelumnya sebesar 4,29%. Tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,28%, 3,37%, 3,46%. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami perubahan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,72%, 3,94%, 3,72%, dan 3,75%. Oleh karena itu dengan meninjau kembali pengeluaran pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya yang tidak banyak diikuti dengan pertumbuhan ekonominya, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Jaya (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2021:92).

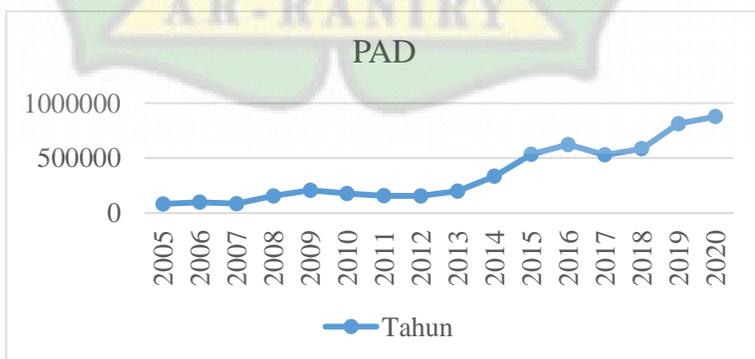
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil akan mempersulit daerah dalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah secara mandiri. Padahal dalam pelaksanaan otonomi

daerah, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan peran PAD di dalamnya.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kendali (kewenangan) Pemerintah kabupaten. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif kemungkinan akan mempengaruhi tingkat kenaikan PAD. Dari perkiraan ini seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan yang hanya terkait dengan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi sangat terkait dengan kegiatan sektor industri, khususnya pada bidang jasa.

**Gambar 1.2**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Jaya**  
**Tahun 2005-2020**



*Sumber: BPS, BPKK, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021*

Angka-angka pertumbuhan yang telah tercapai tersebut tidak menjadikan pemerintah daerah menjadi puas dan berpangku diri. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya sangat dibutuhkan adanya peran aktif pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sendiri dalam mengelola keuangan daerah dan pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005 sampai dengan 2020. Pada tahun 2005 jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp8.222.345.890,00 selanjutnya peningkatan pendapatan asli daerah Rp9.859.734.686 pada tahun 2006 turun menjadi Rp 8.465.684.351 pada tahun 2007, selanjutnya untuk tahun 2008 sebesar Rp15.577.833.421 seterusnya pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp20.658.929.183 dan 2010 sebesar Rp17.759.068.899.413. dan pada tahun 2011 sebesar Rp15.708.899.413 dan tahun 2012 sebesar 15.592.684.003. pada tahun 2013-2020 jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing dengan jumlah Rp19.972.429.649 di tahun 2013 naik pada tahun 2014 sebesar Rp33.430.234.854. dan pada tahun 2015 makin meningkat sebesar Rp53.479.474.400, terus meningkat di tahun 2016 sebesar Rp62.425.121.489, di tahun 2017 jumlah PAD Kabupaten Aceh Jaya mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp52.922,676.525, dan perlahan naik pada tahun 2018 dengan jumlah Rp58.624.901.408, Jumlah PAD Kabupaten Aceh

Jaya terus meningkat pada tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp81.380.813.187, Rp87.904.820.243.

Pengeluaran Pembangunan yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2003 Pengeluaran Pembangunan adalah proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. Pengeluaran pembangunan merupakan cerminan kebijakan yang pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pembangunan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesebroto, 1994).

Pengeluaran Pembangunan dapat disimpulkan sebagai tindakan maupun kebijakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian seperti yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahun. Pengeluaran Pembangunan merupakan unsur agregat sesuai dengan konsep perhitungan pendapatan nasional, dengan membandingkan jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dapat diketahui seberapa besar kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional.

**Gambar 1.3**  
**Pengeluaran pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya**  
**Tahun 2005-2020**



*Sumber: BPS, BPKK, Bappeda Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021*

Seiring dengan kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2005 jumlah Pengeluaran Pembangunan sebesar Rp177.511.234.665, Selanjutnya pada tahun 2006 sebesar Rp200.011.838.623. Tahun 2007 sebesar Rp505.674.310.935, tahun 2008 sebesar Rp201.179.917.912 seterusnya pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar Rp113.069.499.694 dan Rp73.955.525.280. Selanjutnya tahun 2011 sebesar Rp30.801.253.494. dan dari tahun 2012 hingga 2020 jumlah Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp66.856500.789, meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp70.871.749.278, Jumlah tersebut terus meningkat dari 2015 dan

2016 masing-masing berjumlah Rp73.972.370.096, dan Rp84.994.398.854. Pada tahun 2017 jumlah tersebut menurun menjadi Rp39.009.833.649, dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2018 sebesar Rp18.498.633.079. Tahun 2019 dan 2020 jumlah tersebut meningkat yaitu masing-masing sebesar Rp57.386.757.523 dan Rp69.905.639.585.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Febrian (2014) mengatakan bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Madura” mengatakan bahwa mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dan pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Aceh Jaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **,"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengeluaran**

## **Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Kabupaten Aceh Jaya "**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Aceh Jaya?
2. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Aceh Jaya?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Aceh Jaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Aceh Jaya.

3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Aceh Jaya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **Manfaat Ilmiah**

1. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Bagi peneliti, sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang peneliti dapatkan di perkuliahan. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah.

##### **Manfaat Praktis**

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi terdiri dari tiga bab yang meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan kemudian juga dikupas mengenai penelitian terdahulu juga kerangka pemikiran dan seterusnya hipotesis.

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Sedangkan BAB III menyangkut dengan Metode Penelitian yang dibahas pada bagian ini adalah desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisa data yang akan disajikan dengan menggunakan 1.

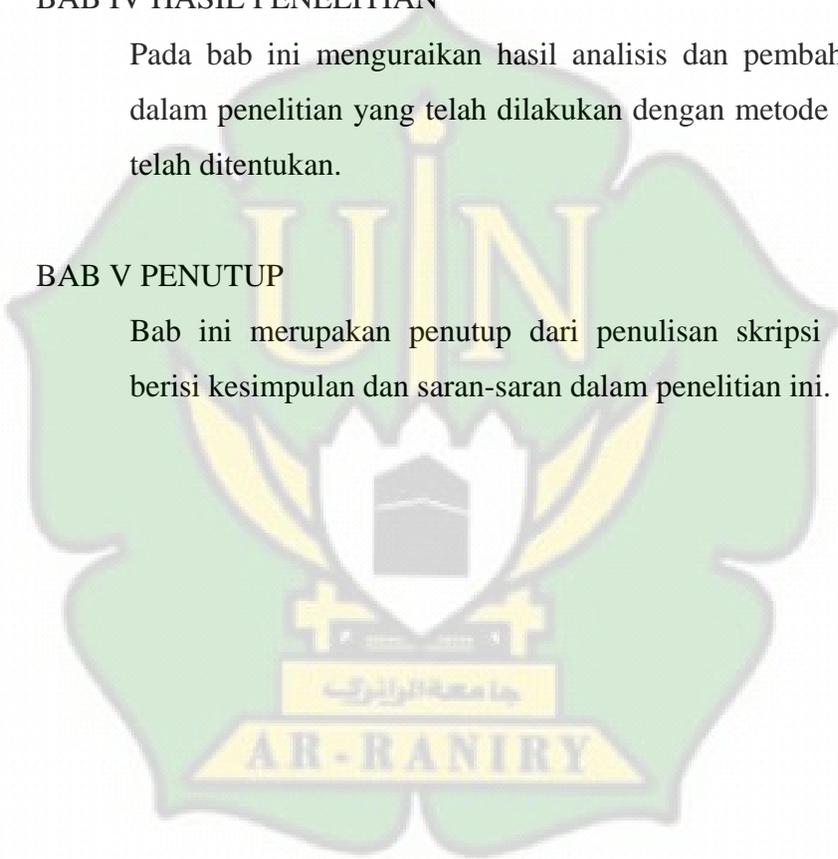
Regresi Linier Berganda, 2. Uji Asumsi Klasik dan 4. Pengujian Hipotesis dan sedangkan pada akhir bab juga disajikan tentang operasional variabel penelitian.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan dengan metode yang telah ditentukan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

##### **2.1.1 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2002:10). Sedangkan Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Beberapa perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktivitas pertanian ke arah sektor non pertanian dan sektor industri ke sektor jasa.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (2004:57) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang menjadi perhatian para ahli ekonomi. Para

ahli ekonomi tersebut telah banyak membahas mengenai pertumbuhan ekonomi sehingga melahirkan beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2006:132-137), terdapat empat teori tentang pertumbuhan ekonomi, antara lain yaitu:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

### 3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock).

### 4. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan

teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (entrepreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada.

#### 5. Teori Keynes

Jhon Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul: *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan diterbitkan pada tahun 1936. Dalam bukunya Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu Negara. Selain menerangkan faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara dan keadaan yang menciptakan berbagai masalah, analisis makroekonomi juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai sesuatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi (Sukirno, 2010).

Dalam teori ini ditunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam satu periode tertentu

dan pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta. Dalam suatu perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan (Hasanah, 2013).

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Investasi perusahaan-perusahaan
- c. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah
- d. Ekspor

### **2.1.2 Teori Pertumbuhan Solow**

Solow mengembangkan suatu model pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan hal-hal lain yang mempengaruhinya, sebagai pembanding fluktuasi jangka pendek, model pertumbuhan Solow biasa disebut sebagai model pertumbuhan neoklasik yaitu:  $Y = F(K,L)$ , dimana  $Y$  merupakan output,  $K$  adalah modal fisik, dan  $L$  angkatan kerja. Berdasarkan model ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan kapital dan pertumbuhan populasi. Karena pertumbuhan kapital dipengaruhi oleh formasi tabungan dan depresiasi kapital, dalam periode tertentu pertumbuhan kapital akan menjadi nol (*zero*). Hal tersebut terjadi dikarenakan nilai modal yang terbentuk dan yang terdepresiasi sama. Karenanya perekonomian akan mencapai kondisi stabil dengan penghasilan yang tetap.

Penyertaan technological progress (perkembangan teknologi) dalam model neoklasik sulit dilakukan, karena asumsi kompetitif standar tidak dapat dipelihara/dijaga. Model endogenous menawarkan penjelasan dari perkembangan teknologi dengan memasukkan perkembangan ke dalam model. Model dasar untuk model pertumbuhan endogenous adalah:

$$Y = f(K, L, A)$$

Dimana  $K$  adalah kapital (termasuk sumber daya manusia) dan  $A$  mewakili kemajuan teknologi. Dalam model ini *the scale of return* mungkin tidak konstan, tergantung pada perkembangan teknologi. Karenanya perekonomian akan menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama teknologi mereka berkembang. Dalam model Solow, teknologi diasumsikan tidak dipengaruhi oleh  $K$  dan  $L$ , artinya perubahan dalam stok  $K$  dan  $L$  tidak mempengaruhi kemajuan teknologi. Dalam kalimat lain, teknologi diasumsikan eksogenous dalam model Solow dan ditentukan oleh hal-hal di luar model dan tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dalam model: perubahan teknologi terjadi begitu saja tanpa penjelasan. Intinya fungsi produksi digambarkan berada pada tingkat teknologi tertentu (given) dan tingkat penawaran tertentu. Fungsi produksi mengindikasikan jumlah output yang diproduksi dengan tingkat input modal ( $K$ ) berbeda dengan  $L$  dan  $A$

tertentu. Dalam output jangka panjang tergantung pada tingkat persediaan modal dalam perekonomian (Athallah, dan Masbar 2013).

### **2.1.3 Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa faktor penentu yang bersifat dinamis, faktor tersebut bisa berlaku atau tidak berlaku apabila diterapkan pada kondisi perekonomian yang berbeda. Namun secara garis besar, faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan aktivitas perekonomian dan menjadi acuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi empat (Prawoto, 2019:165), antara lain:

1. Sumber daya alam. Kekayaan alam bukan hanya dapat meningkatkan output produksi yang lebih besar, namun juga dapat meningkatkan dan memperluas hasil produksi yang diperdagangkan dilingkungan yang lebih luas yaitu ekspor. Kekayaan alam suatu negara berbeda dengan negara lain. Pada tahap awal pembangunan akan banyak menemukan kesulitan dalam mencapai perekonomian yang optimal dan hanya dapat mengandalkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian dan pertambangan.
2. Kualitas sumber daya manusia. Keuntungan yang diperoleh apabila jumlah penduduk tersebut dapat diserap

sebagai tenaga kerja dan pelatihan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan dapat mengeksplorasi sektor-sektor perekonomian menjadi lebih produktif. Jumlah penduduk menjadi ancaman maka akan terjadi peningkatan pengangguran, kemiskinan dan akan terjadi banyak masalah sosial lainnya yang terjadi di tengah masyarakat.

3. Akumulasi kapital dan penerapan teknologi. Tuntunan perekonomian saat ini jauh lebih berkembang dari tahun sebelumnya sehingga barang modal harus di ikuti dengan penerapan teknologi yang modern agar produksi menjadi lebih efisien dan berkualitas. Penerapan teknologi sangat penting untuk mengeksplorasi dari sumber daya yang bersifat tidak diperbarui, hal ini dapat dicapai dengan penerapan teknologi modern dalam menunjang aktivitas perekonomian dalam masyarakat.
5. Kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat dapat menentukan seberapa cepat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menghadirkan pendidikan kepada masyarakat dengan kondisi sosial yang masih tradisional, agar terbuka wawasan dan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

#### **2.1.4 Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Indonesia memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dari negara lain. Sistem ekonomi disentrallisasi pusat sedikit menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan kebijakan ekonomi adalah untuk memakmurkan masyarakat. Awal mula sistem desentralisasi mengalami hambatan dalam implementasinya, sehingga mendorong pemerintah mengeluarkan undang-undang baru untuk mendukung desentralisasi dengan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 yang berisi rumusan masalah yang terjadi pada setiap daerah penyelenggara otonomi daerah tersebut. Kebijakan otonomi daerah terus berjalan hingga sekarang, sehingga dapat menguatkan perekonomian dari setiap daerah (Prawoto, 2019:169), tujuan dari otonomi daerah yang diagendakan oleh pemerintah daerah terdapat empat agenda besar:

1. *Full Employment*. Tujuan dari diselenggarakannya pemerintahan adalah untuk menjamin terciptanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan akan menekan jumlah pengangguran.
2. Tingkat kemakmuran suatu daerah. Saat perekonomian meningkat, banyak tenaga kerja terserap, dan banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi pada daerah, namun

- pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan pengukuran kemakmuran daerah.
3. Kestabilan tingkat harga. Harga yang stabil akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat resah dan pada kondisi terburuk akan terjadi ketidak pastian dalam perekonomian.
  4. Gambaran sruktur perekonomian suatu daerah. Sruktur ekonomi merupakan sektor ekonomi yang menjadi andalan bagi daerah dalam produksi barang-barang maupun jasa-jasa di daerah. Daerah akan melakukan analisis potensi sruktur ekonomi yang menjadi potensi pengembangan produksi yang akhirnya menjadi sumber-sumber pendapatan daerah

### **2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

#### **a. Pengertian PDRB**

Menurut Badan Pusat Statistik (2019:23) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Lebih lanjut, Bank Indonesia (2014:2-3) menjelaskan bahwa PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah, ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

1. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.
2. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

b. Pendekatan penghitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran.

1. PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu; upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha.
2. PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga, pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan modal bruto, selisih ekspor dan selisih persediaan barang (stok). (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2020).

Di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan “Dunia Ketiga” konsep Produk Domestik Bruto adalah konsep yang paling penting jika dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Menurut Sukirno (2013:34) dalam bukunya makroekonomi teori pengantar, Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu.

Menurut Heru (2011) PDRB saat ini sudah menjadi salah satu publikasi BPS yang dikenal luas. Popularitasnya bukan hanya merambah kalangan akademisi, tetapi dalam perkembangan terakhir, justru menjangkau kalangan birokrasi. Di tingkat provinsi

maupun kabupaten atau kota, pemerintah daerah membutuhkannya untuk penyusunan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah. Dengan demikian pembahasan PDRB merupakan suatu yang penting karena menyangkut aspek pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya.

c. Tahun Dasar, Harga Berlaku dan Harga Konstan

Tahun dasar adalah tahun dimana nilai-nilai agregatnya dijadikan sebagai acuan untuk menghitung nilai-nilai agregat konstan tahun-tahun berikutnya. Tujuan dari sistem penyajian yang dibedakan atas dasar harga berlaku (adhb) dan atas dasar harga konstan (adhk) adalah untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai agregat baik secara nominal maupun secara riil dibandingkan terhadap keadaan pada tahun dasar.

Terminologi harga berlaku dan harga konstan merupakan sistem penyajian tabel-tabel statistik PDRB. Penyajian atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa agregat-agregat dinilai terhadap harga yang berlaku pada tahun berjalan, sedangkan penyajian atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa agregat-agregat dinilai terhadap harga pada tahun dasar. (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2021 ).

### 2.1.6 Teori Metode Perhitungan PDRB

Untuk menghitung PDRB secara garis besar ada dua metode yang dapat digunakan yaitu:

1) Metode Langsung, dapat digunakan tiga macam pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi ( *Production Approach* )

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi disuatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan NTB adalah nilai produksi bruto (NPB/output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi. (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2018).

b. Pendekatan Pendapatan ( *Income Approach* )

PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian ini termasuk pula komponen penyusutan

dan pajak tak langsung neto. (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2018)

c. Pendekatan Pengeluaran ( *Expenditure Approach*)

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor neto, di dalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa diproduksi. (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2018)

2) Metode Alokasi (Metode Tidak Langsung)

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akansangat saling menunjang satu sama lain, karena

metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah, sedang metode tidak langsung akan merupakan koreksi dalam pembandingan bagi data daerah. (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2018).

a. Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh NTB atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan NPB/Output dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan harga dari masing-masing kegiatan, subsektor dan sektor. (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2018).

b. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. NTB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan

harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral. Juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun. (BPS Kabupaten Aceh Jaya, 2018).

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu priode tertentu terhadap periode sebelumnya. Dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik, dan teori pertumbuhan Kuznet.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah Baldrice (2017).

Halim (2011) berpendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004 : 213).

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang ini meliputi :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2002:39). Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah untuk membiayai biaya rutin serta biaya pembangunan daerah. PAD juga merupakan sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna untuk menunjang pembangunan daerah serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut (Hidayat, 2009).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya (2008:10) pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin terlalu tergantung dari APBN. Kemajuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan PAD yang positif disisi penerimaannya dan perannya dari tahun ke tahun makin meningkat.

Jadi pengertian Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

### **2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasar UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah

Pengertian pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain-lain (Suparmoko, 1999: 94).

Menurut Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suandy, 2002: 10).

Selanjutnya dapat diartikan mengenai pajak daerah sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri,
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah,
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan

kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah (Davey, 1988: 39).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2002: 258).

Menurut Abuyamin (2010) ada beberapa ciri-ciri pajak yaitu :

1. Iuran pajak
2. Pajak dipungut oleh negara (di Indonesia oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah).
3. Pajak dipungut oleh berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Pemungutan pajak merupakan alih dana dari wajib pajak sebagai pembayaran pajak (sektor swasta) kepada pemungutan pajak atau pengelolaan pajak (negara/pemerintah).
6. Pajak mempunyai fungsi budgeter (mengisi kas negara/anggaran negara dan fungsi regulerent (mengatur kebijakan negara dibidang sosial

ekonomi).tanpa ada kontaprestasi (imbalan) secara langsung bersifat individual.

7. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai tugas umum negara/pemerintah, baik rutin maupun pembangunan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari :

- a. pajak hotel
- b. pajak restoran
- c. pajak hiburan
- d. pajak reklame
- e. pajak penerangan jalan
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. pajak parkir
- h. pajak air tanah
- i. pajak sarang burung walet
- j. pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan
- k. bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2) Retribusi daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya:

uang langganan air minum, uang langganan listrik (Suparmoko, 1999: 94). Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diselesaikan oleh pemerintahan daerah (Suandy, 2002: 258).

Sedangkan di dalam (Yani, 2002: 55) mengemukakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah (Widjaja, 2002:110). Merupakan keuntungan atau laba bersih suatu perusahaan daerah bagi perusahaan milik daerah yang terdiri dari kekayaan daerah, maupun modal yang sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset tetap di daerah atau jasa giro. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut undang-undang No. 9 Tahun 2015 ayat angka 3 antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) jasa giro
- c) pendapatan bunga
- d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/atau jasa oleh daerah.(UU No. 33 Tahun 2004: 217).

### **2.2.3 Peranan Pendapatan Asli Daerah**

Berikut ini Zakiah (2019) mengemukakan ada tiga peranan dalam pendapatan asli daerah yaitu :

1. Peranan Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah  
Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari pajak perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi- potensi pajak yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ciri-ciri mendasar dari pajak daerah yaitu :

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b) Objek pajak terletak pada daerah kabupaten/ kota.

- c) Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat ataupun provinsi.
- d) Tidak memberikan dampak negative terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota.
- e) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Secara umum pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran (budgetary) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sedangkan pajak dalam fungsinya sebagai pengatur (regulatory) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi.

## 2. Peranan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil retribusi daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari retribusi perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi- potensi yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah (Sarjana Ekonomi, 2020) yaitu :

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

### 3. Peranan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Terhadap Penerimaan Daerah

Peranan dari dana bagi hasil sangat berarti bagi Penerimaan Daerah walaupun tidak terlalu besar tetapi sangat membantu keuangan daerah di daerah kabupaten dan kota untuk digunakan dalam menambah jumlah Penerimaan Daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut.

## **2.3 Pengeluaran Pembangunan**

### **2.3.1 Pengertian Pengeluaran Pembangunan**

Pada dasarnya pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi

secara lebih luas dan intensif. Kriteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja (Anwar, 1986: 69).

Pengeluaran pembangunan terdiri dari : 1) pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan rupiah yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman program, 2) pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan proyek yang pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek (Bastian, 2006:205).

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan swasta (Dumairy, 2007:42).

Jadi pengeluaran pembangunan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pembangunan yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Kemudian indikator pengeluaran pembangunan dalam hal ini adalah berbagai proyek baik proyek fisik maupun proyek non fisik yang diprogramkan dalam setiap sektor maupun subsektor.

Dalam buku Marzuki Ilyas (1989: 38) pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar

tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Soediyono (1992: 18) Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, government expenditure atau government purchase meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah menurut Sitaniapessy (2013) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian

tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

### **2.3.2 Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pengeluaran pembangunan**

Menurut Sadono Sukirno dalam buku Marzuki Ilyas (1989:40) faktor yang bersifat ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- a) Faktor yang bersifat ekonomi, adalah yang berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh dapat berjalan pesat.
- b) Faktor bersifat politik dan sosial, adalah faktor yang memakai anggaran pengeluaran yang besar. Seperti menjaga pertahanan dan keamanan negara, bantuan-bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lainnya.

### **2.3.3 Klasifikasi Pengeluaran pembangunan**

Menurut Suparmoko (2012: 57) pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Pengeluaran yang self liquidating sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan balas jasa masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.
- b) Pengeluaran yang produktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- c) Pengeluaran yang tidak self liquidating maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang secara langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan nasional dalam kaitannya jasa-jasa tadi.
- d) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang 28 meskipun

pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.

- e) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar. Menurut Soediyono (1992: 20).

Pengeluaran Pemerintah berdasarkan pos pengeluaran pemerintah yang ada di APBN dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran rutin yaitu terkait biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- b. Belanja pembangunan yaitu terkait biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat proses pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana ekonomi seperti pembangunan jalan raya, irigasi, listrik dan lain-lain; peningkatan sumberdaya manusia seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan perumahan; peningkatan kapasitas

pemerintah seperti pengembangan aparatur pemerintah.

#### **2.3.4 Teori Pengeluaran Pembangunan Secara Mikro**

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar. Menurut Mangkosoebroto (1994:177- 178) secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara penawaran dan permintaan untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

- a. Perubahan permintaan akan barang publik
- b. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang publik
- d. Perubahan harga faktor- faktor produksi

### 2.3.5 Teori Pengeluaran Pembangunan Secara Makro

#### 1. Adolph Wagner

Pengamatan empiris oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan “hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat” (*law of growing public expenditures*). Wagner sendiri menamakannya “hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat” (*law of ever increasing state activity*).

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah : (Dumairy, 1999)

1. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
2. Kenaikan Tingkat pendapatan masyarakat
3. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
4. Perkembangan demokrasi
5. Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

#### 2. Teori Rostow dan Musgrave

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahan-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total-rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya (Mangkoesoebroto, 2001).

### 3. Teori Peacock Wiseman

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah”. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (voting), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu, karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh

penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*)

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Efek ini menyatakan bahwa gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu segera ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah beroleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001).

## **2.4 Hubungan Antar Variabel**

### **2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Tambunan (2006) menyatakan pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan Ekonomi

sehingga dapat dikatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto (2007) menjelaskan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, (Tambunan, 2006). Dengan adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektorsektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektorjasa, dan sektor-sektor lainnya.

#### **2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pembangunan adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2008:122).

Pengeluaran pembangunan terdiri dari 1) pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan rupiah yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri dalam bentuk pinjaman program, 2) pengeluaran pembangunan dalam bentuk pembiayaan proyek yang pendanaannya bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek (Bastian, 2006:205).

Dalam teori Peacock dan Wiseman, dinyatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Peningkatan pada PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tersebut

terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaannya tersebut dengan menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan swasta (Dumairy, 2007:42).

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penelitian diantaranya adalah:

1. Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Madura”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data yang ada di situs resmi Badan Pusat Statistik pada 4 kabupaten di Pulau Madura tahun 2013-2019. Metode analisis yang digunakan adalah

model regresi data panel yakni menggabungkan data time series dengan cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Penelitian Kedua, Penelitian yang dilakukan Bagus (2018) oleh Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di wilayah Sarbagita Provinsi Bali menggunakan metode sampling jenuh dalam penentuan sampel dengan populasi dan sampel adalah wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan pada tahun 2012 - 2016. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi nonpartisipan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

3. Penelitian ketiga, Penelitian yang dilakukan Wasingah (2018) Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang yang selalu dihadapi oleh suatu negara. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.44%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, inflasi dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

4. Penelitian keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2017) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan analisis regresi linier model ekonometrika metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2010 hingga 2016, keuangan kapasitas daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah belum sepenuhnya handal dalam menopang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jambi, sebagai kontribusinya masih relatif rendah yaitu rata-rata 34,13 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode yang sama tumbuh sebesar 6,28 persen per tahun. Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Kesimpulannya adalah peningkatan belanja pemerintah daerah akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah wilayah yang bersangkutan.

5. Penelitian ke Lima, Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah Aceh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh pascatsunami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kuadrat terkecil (OLS) dengan regresi linier model. Variabel penelitian PAD adalah Provinsi Aceh (Y) sebagai variabel terikat dan pertumbuhan ekonomi (X1), dan Belanja Pemerintah Aceh (X2) sebagai Variabel independen. Berdasarkan hasil survei mengungkapkan bahwa variabel X1 dan X2 positif dan pengaruh signifikan terhadap Y pada taraf  $\alpha = 0,10$  dan  $\alpha = 0,01$ . Sedangkan variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap taraf  $\alpha = 0,01$ . Variasi

variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas mampu sebesar 82,90 persen. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa jika semua variabel nol maka provinsi PAD Aceh pasca tsunami (Y) sebesar 1.442 miliar Rupiah.

6. Penelitian ke enam, Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspor, penerimaan pajak, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series berupa ekspor, penerimaan pajak, dan nilai tukar periode 2005- 2014. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi. Persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu  $Y = 3,170 + 0,024X_1 + 0,136X_2 + 0,220X_3$ . Ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibuktikan dari uji t di mana diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,134 > 2,015$ ) dan nilai signifikansi variabel ekspor sebesar  $0,022 < 0,05$ .
7. Penelitian ke tujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Nofrizal (2017) Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal. Unit analisis menggunakan geografis regional. Lokasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini

menggunakan data kuantitatif sekunder. Metode penarikan sampel dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji statistik t, uji statistik F dengan menggunakan aplikasi SPSS.

8. Penelitian ke delapan, Penelitian yang dilakukan oleh Zulgani (2015) Terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan PAD, banyak yang berpendapat, bahwa daerah yang memiliki PAD yang besar dan dialokasikan dengan baik akan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonominya. Tujuan penelitian ini adalah ,Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan PAD Provinsi Jambi, Menganalisis hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi dan PAD Provinsi Jambi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi swasta (PMDN), pendapatan asli daerah dan tenaga kerja berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2000- 2014.
9. Penelitian ke sembilan, penelitian yang di lakukan oleh Prakasa (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan

pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan analisis data panel di setiap 37 Kabupaten kota yang ada di Jawa Timur tahun 2008-2012 juga dilakukan uji chow dan uji Hausman untuk menentukan data regresi yang akan dipakai dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari data sekunder dari BPS dan DJPK. Dari hasil analisis data panel Random Effect Model diperoleh bahwa PAD berpengaruh secara kurang signifikan dan berpengaruh negatif, sementara Belanja barang dan jasa berpengaruh secara positif dan signifikan, lalu belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga dipaparkan bagaimana peneliti memberi solusi dan sarannya untuk pemerintah daerah berdasarkan teori yang sudah ada.

10. Penelitian ke sepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, studi pada kabupaten/kota di pulau sumatera. Variabel bebas adalah PAD dan Belanja Modal. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) dan kabupaten/kota di pulau Sumatera dari 130 populasi dan yang memenuhi kriteria sebanyak 30 sampel. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Pendapatan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil
1	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Madura	Fitria (2020)	Menggunakan Metode analisis regresi data panel.	Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulannya adalah pengeluaran pemerintah, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Gusti (2018)	Menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan bentuk asosiatif	Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.
3	Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa	Wasingah (2018)	Metode analisis yang digunakan dalam	Variabel independen (IPM, kemiskinan, inflasi, jumlah penduduk)

	Tengah		penelitian ini adalah metode data panel.	berpengaruh terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) sebesar 99.92% sementara untuk sisanya yaitu 0.08% dijelaskan oleh variabel lainnya.
4	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi	Zahari (2017)	Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.	Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang digambarkan melalui PDRB atas harga konstan (PDRB Riil) menunjukkan trend yang fluktuatif dan cenderung menurun. Selama periode 2010-2016 rata-rata pertumbuhan sebesar 6,28 persen per tahun.
5	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh setelah Tsunami	Susanti (2017)	Model analisis pada penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan model regresi linear berganda (multiple linear regression)	Model estimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran Pemerintah Aceh terhadap PAD Provinsi Aceh setelah tsunami yang diperoleh dari persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah $Y = 1,442 + 0,016 X_1 + 0,338 X_2$ .
6	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi	Syahputra (2017)	Menggunakan metode analisis regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor,

	Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia		berganda (multiple regression)	penerimaan pajak dan nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
7	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Nofrizal (2017)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
8	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan PAD Provinsi Jambi	Zulgani (2015)	Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, digunakan regresi berganda	Penelitian ini memperlihatkan untuk kasus Provinsi Jambi terdapat hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah atau terjadi hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan PAD.
9	Analisis Pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Prakasa (2014)	Metode Analisis <i>Random Effect</i>	Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan dan bersifat negatif. negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
10	Pengaruh Pendapatan Asli	Yuliana (2014)	Metode Pengumpulan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

	Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi		Data yang digunakan adalah dengan mencatat langsung dari sumbernya sesuai dengan data yang diperlukan.	posistif terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini adalah relatif kecil yaitu sebesar 0,166 .
--	---	--	--	---

*Sumber : Olahan Peneliti, (2021)*

## 2.6 Kerangka Berfikir

Secara umum kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, sosial, budaya serta jaminan persamaan hak dalam politik, hukum dan keamanan/ketertiban. Indikator-indikator output tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (komposit) dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari aspek sosial.

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Membahas mengenai pendapatan asli daerah, bahwa sebagian besar upaya yang dilakukan daerah untuk bisa mengurangi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah dengan memacu upaya memperoleh pendapatan asli daerah sebesar mungkin. Metode yang paling populer sampai dengan saat ini adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam daerah yang ada, dan melalui pajak dan retribusi daerah. Cara pertama sangat mungkin dilakukan, apabila di daerah sumber

daya alamnya memang berlimpah, namun bagi daerah yang miskin akan sumber daya alam umumnya mengambil jalan lain yaitu meningkatkan penerimaan dengan cara kedua.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah kita ketahui bahwa indikator pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk selanjutnya berbagai proyek baik proyek fisik maupun proyek non fisik yang diprogramkan dalam setiap sektor maupun subsektor merupakan indikator dari pengeluaran pembangunan. Kemudian indikator dari pertumbuhan ekonomi daerah antara lain adalah PDRB.

Keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pembangunan diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata. Hal di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian target penerimaan pajak penghasilan masih akan sulit mengingat sangat rendahnya perkiraan laju pertumbuhan ekonomi (Anwar, 1986:87). Terkait dengan penelitian ini menunjukkan bahwa pajak (salah satu sumber pendapatan asli daerah) tergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

#### b. Pengeluaran Pembangunan

Menurut Musgrave (1999:22) menyatakan bahwa dengan memasukkan variabel jumlah dan perubahan harga dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah, merupakan hal yang sangat penting. Harus juga dicatat bahwa selama periode tersebut, telah terjadi peningkatan produktivitas yang sangat cepat yang menghasilkan kenaikan pendapatan perkapita. Pernyataan tersebut menunjukkan pendapatan perkapita berpengaruh pada besarnya pengeluaran pemerintah, hal ini sekaligus berarti bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pembangunan (bagian dari pengeluaran pemerintah).

#### c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai Modern Economic Growth. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007:57). Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik.

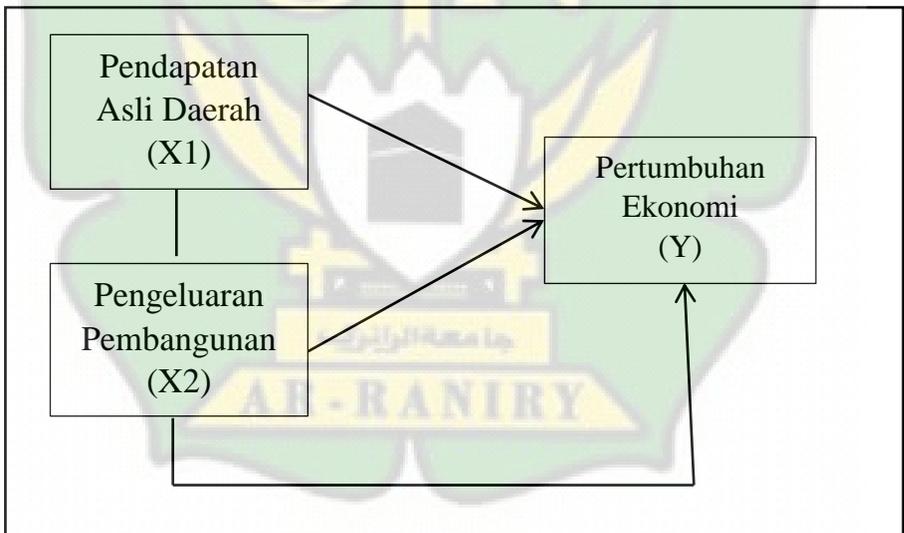
Kerangka Pemikiran merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis sebuah penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu hubungan diantara variabel bebas dan variabel terikat.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Febrian (2014) mengatakan bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan dan bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh beberapa Kabupaten Kota yang ada di

Jawa Timur memberi pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Madura” mengatakan bahwa mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka berfikir Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Kabupaten Aceh Jaya**



Dari kerangka penelitian di atas dapat dijelaskan terdapat variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pengeluaran pembangunan dan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Dari Gambar 2.1 di atas, penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya. Bukan hanya dijelaskan secara teoritis saja, namun juga diperkuat dengan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

## **2.7 Hipotesis**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- H<sub>01</sub> : Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya.
- H<sub>a1</sub> : Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya.
- H<sub>02</sub> : Pengeluaran Pembangunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya.
- H<sub>a2</sub> : Pengeluaran Pembangunan berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Bungin (2017:25) kuantitatif yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, mengambil kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan angka-angka, mengolah statistik dan percobaan terkontrol. Data yang di perlukan pada penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2005-2020, Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2005-2020, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2005-2020. Sedangkan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dalam bentuk angka yaitu data time series. Data time series periode tahun 2005-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2010:122). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti catatan- catatan, data hasil publikasi pemerintah seperti laporan dari BPS atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data pada penelitian ini dengan melakukan penelitian kepustakaan, serta mengambil data yang diperoleh dari badan pusat statistik Kabupaten Aceh Jaya yang tersedia di website maupun secara langsung.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Data yang diperoleh dihimpun melalui teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengumpulkan teori dari buku-buku literature, laporan tahunan serta hasil penelitian terdahulu dan juga data yang bersumber dari BPS Kabupaten Aceh jaya.

### **3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

Pada penelitian ini dilakukan penelitian terhadap Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya.

#### **1. Variabel dependen (Y)**

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel ini adalah variabel yang diamati atau di ukur untuk

menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas, dan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

## 2. Variabel independen (X)

Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen. Menurut rumusan masalah variable independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan.

Secara ringkas operasional variabel penelitian ini ditampilkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Deskripsi	Satuan Ukur
<b>Variabel Dependen</b>		
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.	Persen (%)
<b>Variabel Independen</b>		
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan	Rupiah (Rp)

(X1)	yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin terlalu tergantung dari APBN. Kemajuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan PAD yang positif disisi penerimaannya dan peranannya dari tahun ke tahun makin meningkat.	
<b>Variabel Independen</b>		
Pengeluaran Pembangunan (X2)	Pengeluaran pembangunan merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Kriteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja.	Rupiah (Rp)

Sumber : Olahan Peneliti, (2021)

### 3.5 Model Penelitian

Dalam metode penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2$ ) dengan variabel dependen Y. Menurut Ghazali (2016) analisis regresi linear ialah nilai suatu koefisien pada masing-masing variabel independen. Koefisien berdasarkan  $s =$  pada suatu persamaan yang memprediksi nilai pada variabel dependen.

Penelitian data pada analisis ini telah menggunakan analisis dari regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Rumus model regresi linear berganda ialah sebagai berikut (Ghozali, 2016) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  = Pengeluaran Pembangunan

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi

e = Error Term (Besarnya Nilai Residual)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan data deret waktu (data time series) yaitu dari data tahun 2005-2020. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dengan menggunakan program komputer yaitu Eviews. Berikut adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini:

### 3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan kedua variabel tersebut. Untuk memperoleh model regresi maka penulis menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan pada saat peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan terhadap proposi objek, subjek, kejadian dan sebagainya. Dengan adanya pengujian ini supaya bisa dipergunakan agar dapat mengetahui apakah data yang telah diperoleh dapat berdistribusi normal ataupun tidak (Sudjana, 2005).

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi yang tidak normal atau normal. Jika pada suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil pada uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas pada data dapat dilakukan dengan cara menguji *one sample kolmogrov smirnov* yaitu ketentuan yang apabila nilai signifikan yang didapat diatas 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila

hasil uji *one sample kolmogrov smirnov* mendapatkan nilai signifikan di bawah 5% atau 0,5 maka berarti data tidak memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen atau pada variabel bebas. Efek multikolinearitas ini ialah dapat menyebabkan tingginya variabel pada sampel sehingga hal tersebut berarti eror besar, dan akibatnya ketika koefisien diuji t-hitung akan bernilai lebih kecil dari t-tabel. Hasil ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi pada variabel dependen. Untuk melihat multikolinearitas pada model regresi pada model ini dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Pada nilai *tolerance* ini untuk mengukur variabilitas pada variabel bebas yang terpilih namun tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi pada nilai *tolerance* rendah serta dengan nilai VIF tinggi, karena  $VIF = 1/tolerance$  yang menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Pada nilai *cut off* yang digunakan ialah nilai *tolerance* 0,10 dan nilai VIF di atas angka 10 (Ghozali, 2016).

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk dapat menguji apakah didalam model regresi terdapat ketidaksamaan antara pengamatan dari varians residul satu ke pengamatan lainnya. Jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas di suatu model regresi linear berganda ialah dengan melihat *Scatterplot* atau dengan melihat nilai prediksi pada variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error ialah ZPRED. Jika terdapat pola tertentu serta tidak menyebar di atas ataupun di bawah angka nol pada sumbu y, maka data dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan pada model penelitian yang baik ialah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

### d. Uji Autokorelasi

Apabila persamaan regresi tidak memiliki masalah autokorelasi maka persamaan regresi itu bisa di sebut baik, sebaliknya apabila terjadi autokorelasi maka persamaan itu bisa dikatakan tidak layak dipakai prediksi atau tidak baik. Satu masalah akan timbul jika autokorelasi terjadi korelasi secara linier terhadap kesalahan pengganggu pada priode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya masalah terhdap autokorelasi yaitu dengan menguji Durbin Watson (DW) yaitu sebagai berikut, menurut (Sugiyono, 2017).

ada beberapa kriteria untuk menentukan uji Autokorelasi yaitu:

- 1) Dapat terjadi autokorelasi positif, apabila nilai dari DW dibawah -2 ( $DW < -2$ ).
- 2) Tidak terjadinya autokorelasi apabila, nilai dari DW diantara -2 dan 2 ( $-2 < DW \leq 2$ ).
- 3) Dapat terjadi autokorelasi negatif apabila DW diatas 2 ( $DW > 2$ ).

### **3.7 Uji Koefisien Determinasi (R-square)**

Nilai dari koefisien determinasi dimana menunjukkan sebagai R<sup>2</sup> secara normal berada pada kisaran antara 0 sampai 1 sampai paling mendekati 1, semakin kuat variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan apabila perolehan jumlahnya sedikit maka akan menunjukkan tidak adanya pengaruh yang spesifik diantar kedua variabel tersebut baik itu variabel independen dan variabel dependen. Kemampuan variabel-variabel independen yang nilai adjusted R<sup>2</sup> kecil berarti sangatlah terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. (Ghozali, 2011).

### **3.8 Pengujian Hipotesis**

#### **3.8.1 Uji Simultan (Uji F)**

Menurut Sugiyono (2018) terdapat hubungan yang positif dan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan  $\alpha = 0,05$ . Jika signifikan  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen. Sebaliknya, jika  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

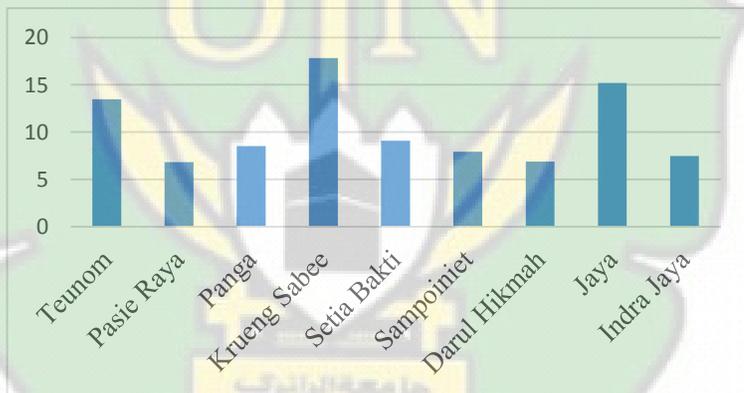
### **3.8.2 Uji Parsial (Uji t)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial dapat mempunyai pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini tingkat signifikansi pada masing-masing variabel bebas ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan serta variabel terikatnya ialah Pertumbuhan Ekonomi. Pada penelitian ini dilakukan dengan dilakukan dengan cara membandingkan diantara  $t$  hitung dengan  $t$  tabel dan apabila nilai signifikansi yang didapat  $< 0,05$  atau  $\alpha = 5\%$  maka hipotesis dapat diterima. (Ghozali, 2016).



Kabupaten Aceh Jaya memiliki 9 Kecamatan 21 Mukim dengan jumlah Desa sebanyak 172 Desa atau gampong yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Jaya memiliki luas wilayah sebesar 3.814 Km<sup>2</sup>. Adapun jumlah penduduk yang ada pada Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2020 tercatat mencapai 93.159 ribu jiwa dan dapat dilihat pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Jaya.

**Gambar 4.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020**



*Sumber: BPS Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pada setiap Kecamatan, penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2020 berjumlah 93.159 ribu jiwa. Jumlah penduduk paling banyak terdapat pada Kecamatan Krueng Sabee dengan jumlah penduduk sekitar 17.814 ribu jiwa, selanjutnya jumlah penduduk terbanyak ada pada Kecamatan Jaya dengan

Jumlah penduduk sekitar 15.187 ribu jiwa, dan Kecamatan Teunom dengan 13.471 ribu penduduk. Dari kesembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya terdapat satu Kecamatan yang jumlah penduduknya lebih sedikit diantara Kecamatan lain yaitu Pasie Raya dengan jumlah penduduk sekitar 6.824 ribu jiwa, paling sedikit diantara sembilan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2020.

## **4.2 Deskripsi Penelitian**

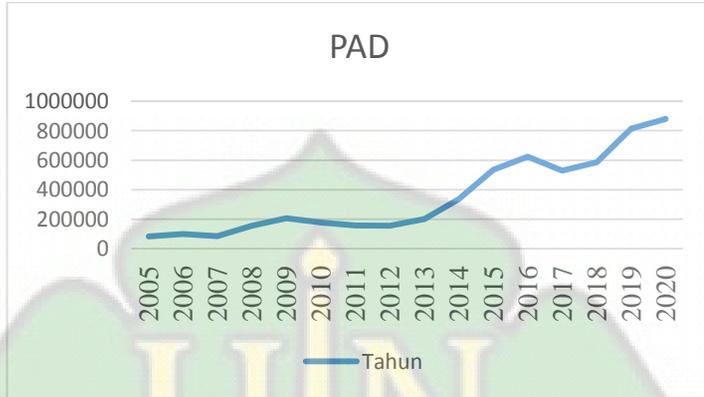
Penelitian ini memakai 3 (tiga) data, yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian data mengenai Pengeluaran Pembangunan, dan data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020.

### **4.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu pemasukan dari daerah dengan berlandaskan pada konstitusi yang diatur sesuai UU. Adanya PAD bermaksud memberikan wewenang dan membentuk suatu wilayah dalam menalani otonomi daerah berdasarkan dengan kemampuan wilayah dalam mewujudkan desentralisasi. Berikut merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya dari tahun 2005 sampai 2020:

**Gambar 4.3**

**Jumlah PAD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020**



*Sumber: BPS Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021*

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Jaya mengalami fluktuasi. Tahun dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah nimal sebesar Rp87.904.820.243. Sejak tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan terjadinya penurunan Pendapatan pada tahun 2010-2013. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang paling rendah terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp8.465.684.351.

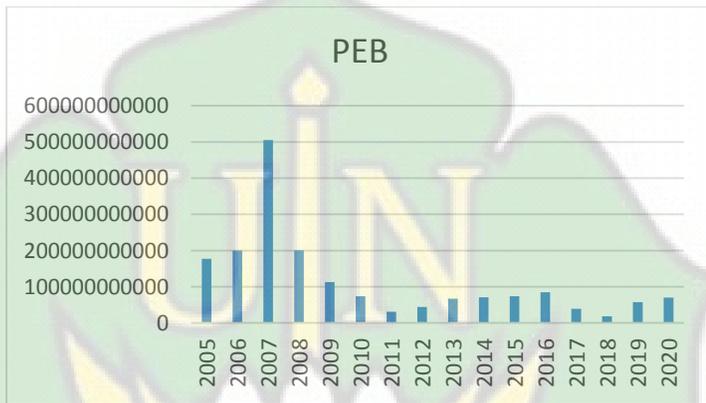
#### **4.2.2 Pengeluaran Pembangunan**

Pengeluaran Pembangunan dapat disimpulkan sebagai tindakan maupun kebijakan pemerintah dalam mengatur jalannya

perekonomian seperti yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahun.

**Gambar 4.4**

**Pengeluaran pembangunan Kabupaten Aceh Jaya**



*Sumber: BPS Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021*

Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada tabel di atas juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2007 Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp505.674.310.935 jumlah nominal tersebut yang paling besar diantara tahun lainnya. Karena pada tahun tersebut Kabupaten Aceh Jaya banyak mengeluarkan dana untuk Pembangunan wilayah dan memperbaiki sarana dan infrastruktur yang terdapat di berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan Pengeluaran Pembangunan pada tahun 2018 sebesar Rp18.498.633.079 jumlah yang paling sedikit diantara tahun

lainnya, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari pada tahun-tahun sebelumnya.

#### 4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 4.5**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya**



Sumber: BPS Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021

Berdasarkan pada gambar 4.5 di atas laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya mengalami fluktuasi. Tahun dengan tingkat Pertumbuhan Ekonomi paling rendah terjadi pada tahun 2006 tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Jaya sebesar

2,66%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 4,61%. Hal ini disebabkan pada tahun 2006 Kabupaten Aceh Jaya masih membangun wilayahnya akibat terjadinya Tsunami pada akhir tahun 2004, Kabupaten Aceh Jaya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memulihkan keadaan Ekonomi di wilayahnya.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

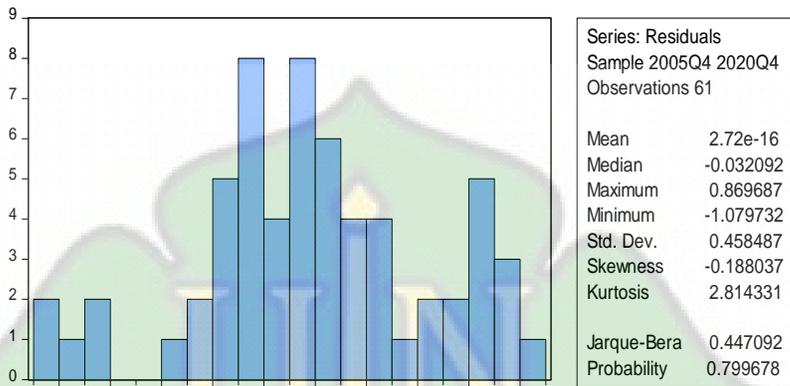
#### **4.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut variabel terikat dan variabel bebas keduanya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik itu adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:

- a. Jika nilai Jarque Bera  $> 0,05$ , maka nilai residual berdistribusi normal.
- b. Jika nilai Jarque Bera  $< 0,05$ , maka nilai resid ual tidak berdistribusi normal.

Adapun hasil Uji Normalitas bisa dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**



*Sumber : Olahan Peneliti, (2021)*

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas di atas adalah dengan nilai Jarque-Bera sebesar 0,447092 yaitu dengan  $p$  value sebesar 0.799678 dimana  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

#### **4.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan ada korelasi diantara variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji

multikolinearitas adalah sebagai berikut: Jika melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah:

- a. Jika nilai VIF  $< 10,00$  maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut.
- b. Jika nilai VIF  $> 10,00$  maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi (Husein, 2014).

Adapun hasil Uji Multikolinearitas bisa dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Variabel</b>	<b>Coefficient Variance</b>	<b>Uncentered VIF</b>	<b>Centered VIF</b>
C	19.83215	5563.181	NA
LOGPAD	0.010277	1660.929	1.624760
LOGPEB	0.010015	1776.295	1.624760

Sumber : Olahan Peneliti, (2021)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai centered VIF baik X1 dan X2 adalah sebesar 1,624760 dimana nilai tersebut yaitu kurang dari 10,00 maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana terjadi perbedaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Jika varians sama, maka dapat dikatakan wujud homokedasitas, sebaliknya jika varians tidak sama terjadi heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- c. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah dalam uji heteroskedastisitas.
- d. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah dalam uji heteroskedastisitas.

Adapun hasil Uji Heteroskedastisitas bisa dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<i>F-Statistic</i>	55.95260	<i>Prob. F(5,50)</i>	0.0000
<i>Obs*R-squared</i>	47.50905	<i>Prob. Chi-square(5)</i>	0.0000

Sumber : Olahan Peneliti, (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa *P value* yang ditunjukkan dengan nilai prob. *Chi-Square(5)* pada *Obs\*R-squared* yaitu sebesar 0,0000. Nilai *P value*  $0,0000 < 0,05$  maka terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan di mana ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (*disturbance term*) dalam analisis regresi berganda. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah penelitian terdapat hubungan residual antar waktu pada model penelitian yang digunakan, sehingga estimasi menjadi bias. Identifikasi ada tidaknya permasalahan autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey serial Correlation LM Test*. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Adapun hasil Uji Autokorelasi bisa dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini:

**Tabel 4.4**

**Hasil Uji Autokorelasi**

*Breusch-Godfrey serial Correlation LM Test:*

<b><i>F-Statistic</i></b>	70.01319	<b><i>Prob. F(5,53)</i></b>	0.0000
<b><i>Obs*R-squared</i></b>	52.97898	<b><i>Prob. Chi-square(5)</i></b>	0.0000

*Sumber : Olahan Peneliti, (2021)*

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa *P value* yang ditunjukkan dengan nilai prob. *Chi-Square(5)* pada *Obs\*R-squared* yaitu sebesar 0,0000. Nilai *P value*  $0,0000 < 0,05$  maka terjadi masalah Autokorelasi dalam model regresi ini.

#### 4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan pemodelan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent yang lebih dari suatu variabel. Regresi linier berganda juga digunakan untuk melihat arah hubungan baik positif atau negatif dari masing-masing variabel selain itu juga dapat memprediksi nilai dari variabel dependen jika variabel independent mengalami kenaikan dan penurunan nilai. Penelitian ini menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Dependen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan, Pengeluaran Pembangunan sebagai variabel independennya. Hasil model regresi ditunjukkan pada Tabel 4.5 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

<b>Variabel</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.*</b>
C	22.40626	4.453331	5.031349	0,0000
LOGPAD	-0.224042	0.101373	-2.210074	0,0311
LOGPEB	-0.529359	0.100075	-5.289628	0,0000

Sumber : Olahan Peneliti, (2021)

Berdasarkan hasil Tabel 4.5 dapat ditulis persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = 22.40626 - 0.224042 - 0.529359$$

Persamaan di atas mengandung makna bahwa:

- a. Nilai konstanta adalah sebesar 22.40626 menunjukkan jika semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pembangunan dianggap tetap maka nilai Pertumbuhan Ekonomi yang di lambangkan Y adalah sebesar 22.4%.
- b. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar -0.224042 hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan jika variabel lainnya di asumsikan bernilai tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1%, maka Pertumbuhan Ekonomi akan menurun sebesar 0.224042.
- c. Nilai koefisien Pengeluaran Pembangunan sebesar - 0.529359 hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pembangunan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan jika variabel lainnya diasumsikan bernilai tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan Pengeluaran Pembangunan sebesar 1%, maka Pertumbuhan Ekonomi akan menurun sebesar 0.529359.

## **4.5 Pengujian Hipotesis**

### **4.5.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Berdasarkan uji statistik t menunjukkan bahwa:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variable	t-hitung	t-table
C	5.031349	2.00172
X1	-2.210074	2.00172
X2	-5.289628	2.00172

*Sumber : Olahan Peneliti, (2021)*

Berdasarkan keterangan Tabel 4.6 di atas, thitung pada variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah 2.210074 dan Pengeluaran Pembangunan sebesar 5.289628. Di sini dapat diketahui ttabel dengan menghitung derajat bebas (df) dengan n (jumlah pengamatan), k (jumlah variabel-1), oleh karena itu di sini memiliki 61 pengamatan dan memiliki 2 variabel independen. Jadi  $(df) = n - k - 1 = 61 - 2 - 1 = 58$ , maka didapatkan derajat bebas sebesar sehingga ttabel sebesar 2.00172 Berdasarkan tersebut maka:

1. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki t hitung sebesar 2,210074 dan t tabel sebesar 2,00172 oleh karena itu berdasarkan keterangan tersebut maka t hitung  $>$  t tabel maka  $H_0$  ditolak, artinya secara statistik bahwa data ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi. Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel.

2. Pada variabel Pengeluaran Pembangunan (X2) memiliki t hitung sebesar 5.289628 dan t tabel sebesar 2,00172 oleh karena itu berdasarkan keterangan tersebut maka t hitung > t tabel maka  $H_0$  ditolak, artinya secara statistik bahwa data ini menunjukkan bahwa retribusi Pengeluaran Pembangunan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel.

#### 4.5.2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian simultan adalah uji F sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

F hitung	14.92
F tabel	2.76

*Sumber : Olahan Peneliti, (2021)*

Berdasarkan tabel 4.7 maka diperoleh hasil uji signifikansi simultan diperoleh nilai  $F_{hitung} = 14.92$  sedangkan untuk  $F_{tabel} = 2.76$ , karena nilai  $F_{hitung} = 14.92 > F_{tabel} = 2.76$ , maka kesimpulan yang dapat diambil adalah menolak  $H_0$ . Begitu juga jika dilihat dari nilai  $Prob(F\text{-statistic})$  diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000006 yang berada di bawah nilai 0.05, sehingga kesimpulan yang diambil adalah menolak  $H_0$ . Artinya semua

variabel independen diasumsikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

#### 4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (*R square*)

Pengujian *R square* bertujuan agar bisa melihat seberapa besa bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

**Tabel 4.8**  
**Hasil R-Square**

R- Squared	0.339712
Adjusted R-Squared	0.316943

*Sumber : Olahan Peneliti, (2021)*

Berdasarkan Tabel 4.8 yang memaparkan hasil dari pengolahan data regresi linear berganda maka diperoleh hasil bahwa diperoleh nilai *R-square* sebesar 0,339712 hal ini berarti bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 33,97% sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.

#### 4.6 Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dari hasil regresi linear berganda dengan menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pembangunan sebagai variabel

independen. Maka hasil regresi linear berganda tersebut dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

#### **4.6.1 Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil olahan data pada eviews, diketahui bahwa terjadinya masalah pada Uji heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi sehingga nilai prob. *Chi-Square(5)* pada *Obs\*R-squared* yaitu sebesar 0,0000. Yang mana nilai *P value*  $0,0000 < 0,05$ . Sehingga dapat di simpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas dan Autokorelasi pada model regresi ini. Nilai koefisien Pendapatan Asli daerah (X1) sebesar -0,224042 dengan nilai probabiliti 0,0311. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Saran dari Penulis diharapkan untuk Peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitiannya contohnya seperti variabel Dana lokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Kemiskinan.

Hasil peneltian ini dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Aceh Jaya belum mampu menggali sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain pedapatan asli yang sah.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2017) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manduapessy (2020) dengan hasil analisis pengaruh langsung (*path coefficient*) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.

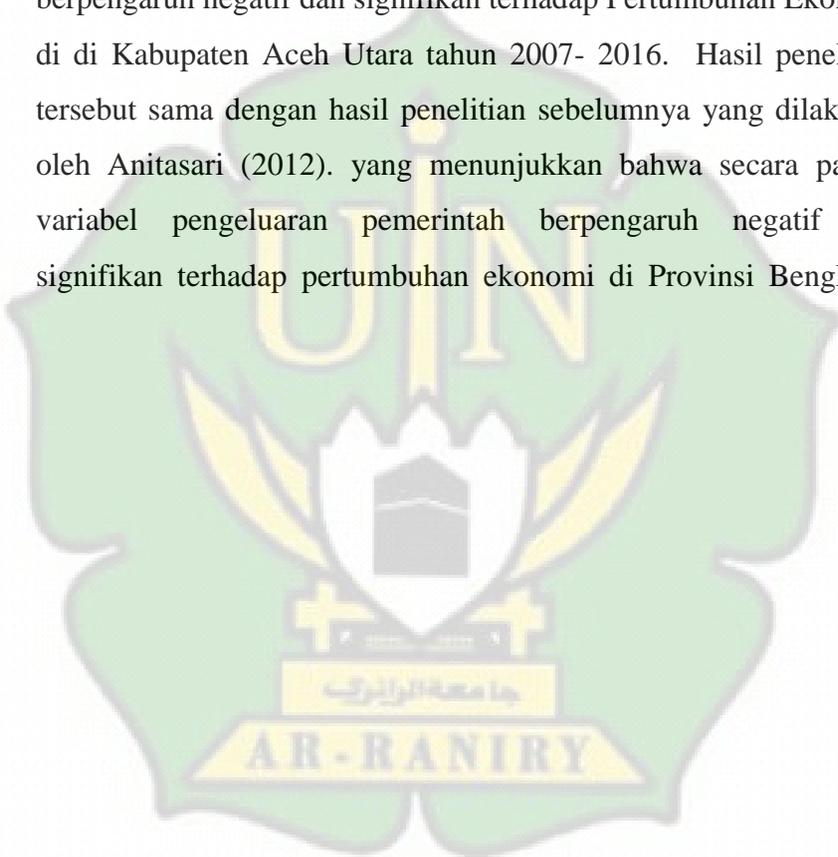
#### **4.6.2 Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil olahan data pada evIEWS, diketahui bahwa terjadinya masalah pada Uji heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi sehingga nilai prob. *Chi-Square(5)* pada  $Obs \cdot R\text{-squared}$  yaitu sebesar 0,0000. Yang mana nilai *P value*  $0,0000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas dan Autokorelasi pada model regresi ini. Nilai koefisien Pengeluaran Pembangunan ( $X_2$ ) sebesar -0,529359 dengan nilai probabilitas 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pembangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Saran dari Penulis diharapkan untuk Peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitiannya contohnya seperti variabel Investasi, Pajak Daerah dan Tenaga Kerja.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jaya disebabkan oleh akumulasi pengeluaran pemerintah ternyata lebih besar digunakan untuk belanja rutin, Sehingga oleh karena itu jumlah belanja

pembangunan tidak mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Jaya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Nurmauliza (2018) yang mengatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di di Kabupaten Aceh Utara tahun 2007- 2016. Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anitasari (2012). yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini dapat disebutkan dengan melihat besarnya koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar  $-0,224042$  dan memiliki nilai signifikansi di bawah  $0,05\%$  yaitu sebesar  $0,0311$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan dan jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka tidak akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Dari hasil Uji t (parsial) variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari  $0,05$  yaitu sebesar  $0,0311$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pengeluaran Pembangunan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini dapat disebutkan dengan melihat besarnya koefisien Pengeluaran Pembangunan sebesar -

0,529359, dan memiliki nilai signifikan dibawah 0,05% yaitu 0,0000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pengeluaran Pembangunan berpengaruh negatif signifikan dan jika Pengeluaran Pembangunan meningkat maka pertumbuhan Ekonomi akan menurun. Dari hasil Uji t (parsial) variabel Pengeluaran Pembangunan ( $X_2$ ) memiliki nilai probabiliti lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengeluaran Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Dari hasil regresi linear berganda maka diperoleh hasil uji signifikansi simultan bahwa nilai Prob(F-statistic) Sebesar 0.000006 yang mana nilai tersebut memiliki nilai probabiliti yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga semua variabel independen diasumsikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan selanjutnya peneliti akan melanjutkan menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pembangunan atau belanja pelayanan publik lebih bersifat sebagai akumulasi stok kapital. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Kabupaten pemekaran pasca pelaksanaan otonomi daerah untuk lebih meningkatkan alokasi Pengeluaran Pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus terus mendorong kegiatan ekonomi masyarakat pada semua sektor ekonomi, baik dari sisi regulasi peraturan daerah maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik.
3. Hendaknya pemerintah kabupaten aceh Jaya lebih baik dalam mengalokasikan anggaran pengeluaran pembangunan secara terarah dan terkendali agar adanya efisiensi dalam pemerintahan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2010). *Perpajakan Pusat Dan Daerah*. Bandung: Humaira.
- Anitasari, M. (2012). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu, 117–127.
- Anwar, Arsjad Moh. (1986). *Prospek Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1986/1987*. Jakarta: UI-Press.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5* . UPP STIM YKPN.
- Arsyad, Lincoln. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. YVJ'IS. Jakarta.
- Athallah, Masbar, R. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*.
- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Selatan vol. 14 no 02, 2014*.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bappeda Kabupaten Aceh Jaya. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK)*.
- Baldric. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. UUP STIM YKPN.
- BPS. *Statistik Kabupaten Aceh Jaya Tahun (2008)* : Badan Pusat Statistik.  
*Statistik Kabupaten Aceh Jaya Tahun (2018)* : Badan Pusat Statistik.  
*Statistik Kabupaten Aceh Jya Tahun (2019)* : Badan Pusat Statistik.

- . *Statistik Kabupaten Aceh Jaya Tahun (2021)* : Badan Pusat Statistik.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin, Burhan. *Metologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenoda Media Group, Jakarta, (2010).
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Davey, Kenneth. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI-Press.
- Dumairy.(1999). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Erlangga.
- Dumairy. (2007). *Perekonomian Indonesia*. Cetakan kelima. Jakarta:Erlangga.
- Fahrurrazy. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kab. Aceh Utara Dengan Pendapatan Sektor Pembentuk PDRB*. Tesis, Pascasarjana USU, (2009).
- Febrian, Prakasa Dwi. (2014). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)*.
- Fitria, Bani. (2020). *analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau madura*. *jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang*.
- Ghozali, Imam. (2009). *"Aplikasi Multivariate Program SPSS"*, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, Uswatun. (2013). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syir'ah*.
- Hasan, Said Hamid. (1994). *Pendidikan IPS 2*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Harianto. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harnita, Sri Astuty. (2020). Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal, Universitas Negri Makassar*.
- Heru, B. (2011). *Penyusunan, Pemaknaan, dan Sosialisasi PDRB*. Jakarta: AIS Press.
- Hidayat, Afri. (2009). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Husein, Umar. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irianto, Agus. (2015). *Statistik (Konsep Dasar, Aplikasi dan pengembangannya)*. Jakarta : Kencana.
- Jhingan, M.L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kuznets, Simon. (2004). *Economic Growth as Environmental Policy? Reconsidering the Environmental Kuznets Curve*. Cambridge University Press.
- Mandupessy, Rulan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*.
- Marzuki, Ilyas. (1989). *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mangkoesoebroto, Guritno. (1994). *Kebijakan Publik Indonesia Substansidan. Urgensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mangkoesoebroto, Guritno. (2001). *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. (1999). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Mustafa, Hasan. (2002). *SDM dan Otonomi Daerah*. (Online), (<http://search.yahoo.com>).
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunung kidul. *Jurnal Maksipreneur*.
- Nisa, Aulia. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Nurmauliza, Devi Andriyani. (2018). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Utara 2007-2016.

Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun (2015). tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Jakarta.

Prawoto, N. (2019). Pengantar Ekonomi Makro. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada.

Prasetyo, Bambang dan Lina, M Janah. *Metode Penelitian Kuantitatif (teori dan implikasi)*. Rajawali Pers, Jakarta. (2005).

Santoso, Singgih, “*SPSS Mengolah data statistic secara professional*”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta : (2002).

Sari, Nani. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali Tahun 2003-2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Sitaniapessy, Harry A.P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pdrb dan Pad. Jurnal *Economia*.

Sutriningsih, (2014). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH Terhadap Belanja DaerahBidang Pendidikan (Study Kasus Pulau Sumatera Tahun 2011-2013). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Gresik [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). 15.Desember. 2016.

Soediyono. (1989). *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.

Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito.

Suparmoko. (2012). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.

- Suparmoko, M. (1999). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta, Bandung, (2009).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2002). *Makro Ekonomi Teori Modern*, PT. Rajawali Grafindo Persada : Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2008). *Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hi Keynesian Baru*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudjana. (1996). *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Suandy, Erly. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyo, B. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta : Penaku.
- Tambunan, Tulus. (2006). *upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. Diakses dari <http://www.kadin-indonesia.or.id>.

- Todaro, P Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendapatan Asli Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Uyanto, Stanislaus. S, (2009). *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuliarmi, N.N & Marhaeni, N. (2019). *Metode Riset. Jilid 2*. Bali : Cv. Sastra Utama.
- Zakiah. F. U. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Dalam Membangun Infrastruktur Kota Bandar Lampung Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2010-2017 (Studi di Kota Bandar Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## Lampiran 1

### Data Asli Variabel dalam Penelitian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pengeluaran Pembangunan (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)
2005	8.222.345.890	177.511.234.665	2,50%
2006	9.859.734.686	200.011.838.623	2,66
2007	8.465.684.351	505.674.310.935	2,95
2008	15.577.833.421	201.179.917.912	4,24
2009	20.658.929.183	113.069.499.694	4,13
2010	17.759.068.582	73.955.525.280	4,61
2011	15.708.899.413	30.801.253.494	4,44
2012	15.592.684.003	44.309.944.393	4,11
2013	19.972.429.649	66.856.500.789	4,29
2014	33.430.234.854	70.871.749.278	3,28
2015	53.479.474.400	73.972.370.096	3,37
2016	62.425.121.489	84.994.398.854	3,46
2017	52.922,676.525	39.099.833.649	3,72
2018	58.624.901.408	18.498.633.079	3,94
2019	81.380.813.187	57.386.757.523	3,72
2020	87.904.820.243	69.905.639.585	3,75

## Lampiran 2

### Data Penelitian Interpolasi Data Tahunan Ke Quartalan

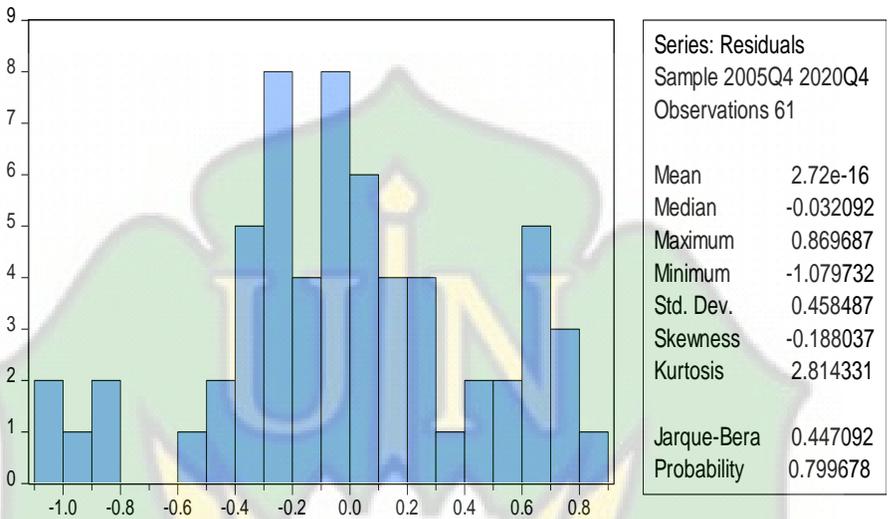
	PAD	PEB	PE
2005Q4	8222345890	177511234566	2.5
2006Q1	8631693089	183136385580	2.54
2006Q2	9041040289	188761536595	2.58
2006Q3	9450387488	194386687609	2.62
2006Q4	9859734687	200011838623	2.66
2007Q1	9511222103	276427456701	2.7325
2007Q2	9162709520	352843074779	2.805
2007Q3	8814196936	429258692857	2.8775
2007Q4	8465684352	505674310935	2.95
2008Q1	10243721619	429550712679	3.2725
2008Q2	12021758887	353427114424	3.595
2008Q3	13799796154	277303516168	3.9175
2008Q4	15577833421	201179917912	4.24
2009Q1	16848107362	179152313358	4.2125
2009Q2	18118381302	157124708803	4.185
2009Q3	19388655243	135097104249	4.1575
2009Q4	20658929183	113069499694	4.13
2010Q1	19933964033	103291006091	4.25
2010Q2	19208998883	93512512487	4.37
2010Q3	18484033732	83734018884	4.49
2010Q4	17759068582	73955525280	4.61

2011Q1	17246526290	63166957334	4.5675
2011Q2	16733983998	52378389387	4.525
2011Q3	16221441705	41589821441	4.4825
2011Q4	15708899413	30801253494	4.44
2012Q1	15679845561	34178426219	4.3575
2012Q2	15650791708	37555598944	4.275
2012Q3	15621737856	40932771668	4.1925
2012Q4	15592684003	44309944393	4.11
2013Q1	16687620415	49946583492	4.155
2013Q2	17782556826	55583222591	4.2
2013Q3	18877493238	61219861690	4.245
2013Q4	19972429649	66856500789	4.29
2014Q1	23336880951	67860312912	4.0375
2014Q2	26701332252	68864125034	3.785
2014Q3	30065783554	69867937157	3.5325
2014Q4	33430234855	70871749279	3.28
2015Q1	38442544741	71646904483	3.3025
2015Q2	43454854628	72422059688	3.325
2015Q3	48467164514	73197214892	3.3475
2015Q4	53479474400	73972370096	3.37
2016Q1	55715886173	76727877286	3.3925
2016Q2	57952297945	79483384475	3.415
2016Q3	60188709718	82238891665	3.4375
2016Q4	62425121490	84994398854	3.46

2017Q1	60049510249	73520757553	3.525
2017Q2	57673899008	62047116252	3.59
2017Q3	55298287766	50573474950	3.655
2017Q4	52922676525	39099833649	3.72
2018Q1	54348232746	33949533507	3.775
2018Q2	55773788967	28799233364	3.83
2018Q3	57199345187	23648933222	3.885
2018Q4	58624901408	18498633079	3.94
2019Q1	64313879353	28220664190	3.885
2019Q2	70002857298	37942695301	3.83
2019Q3	75691835243	47664726412	3.775
2019Q4	81380813188	57386757523	3.72
2020Q1	83011814952	60516478039	3.7275
2020Q2	84642816716	63646198554	3.735
2020Q3	86273818480	66775919070	3.7425
2020Q4	87904820244	69905639585	3.75

### Lampiran 3

### Hasil Uji Normalitas



## Lampiran 4

### Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 01/15/22 Time: 09:47

Sample: 2005Q4 2020Q4

Included observations: 61

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	19.83215	5563.181	NA
LOGPAD	0.010277	1660.929	1.624760
LOGPEB	0.010015	1776.295	1.624760

## Lampiran 5

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	55.95260	Prob. F(5,50)	0.0000
Obs*R-squared	47.50905	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/15/22 Time: 09:49

Sample (adjusted): 2007Q1 2020Q4

Included observations: 56 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.024662	0.014197	1.737151	0.0885
RESID^2(-1)	1.378021	0.139813	9.856189	0.0000
RESID^2(-2)	-0.585642	0.239797	-2.442239	0.0182
RESID^2(-3)	-0.036690	0.253668	-0.144639	0.8856
RESID^2(-4)	-0.034260	0.236917	-0.144608	0.8856
RESID^2(-5)	0.080665	0.123125	0.655151	0.5154

R-squared	0.848376	Mean dependent var	0.144398
Adjusted R-squared	0.833214	S.D. dependent var	0.186720
S.E. of regression	0.076255	Akaike info criterion	-2.208500
Sum squared resid	0.290744	Schwarz criterion	-1.991498
Log likelihood	67.83800	Hannan-Quinn criter.	-2.124369
F-statistic	55.95260	Durbin-Watson stat	1.805991
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Lampiran 6

### Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	70.01319	Prob. F(5,53)	0.0000
Obs*R-squared	52.97898	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/15/22 Time: 09:50

Sample: 2005Q4 2020Q4

Included observations: 61

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.152928	2.277014	-0.945505	0.3487
LOGPAD	0.036696	0.046535	0.788571	0.4339
LOGPEB	0.050713	0.052155	0.972361	0.3353
RESID(-1)	1.126440	0.137117	8.215188	0.0000
RESID(-2)	-0.115263	0.206537	-0.558072	0.5791
RESID(-3)	-0.077026	0.206889	-0.372304	0.7112
RESID(-4)	-0.071450	0.206642	-0.345766	0.7309
RESID(-5)	0.030145	0.148252	0.203336	0.8397
R-squared	0.868508	Mean dependent var	2.72E-16	
Adjusted R-squared	0.851141	S.D. dependent var	0.458487	
S.E. of regression	0.176894	Akaike info criterion	-0.504814	
Sum squared resid	1.658457	Schwarz criterion	-0.227978	
Log likelihood	23.39683	Hannan-Quinn criter.	-0.396319	
F-statistic	50.00942	Durbin-Watson stat	1.291175	
Prob(F-statistic)	0.000000			

## Lampiran 7

### Hasil Uji Regresi

Dependent Variable: PE

Method: Least Squares

Date: 01/15/22 Time: 09:45

Sample: 2005Q4 2020Q4

Included observations: 61

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.40626	4.453331	5.031349	0.0000
LOGPAD	-0.224042	0.101373	-2.210074	0.0311
LOGPEB	-0.529359	0.100075	-5.289628	0.0000
R-squared	0.339712	Mean dependent var	3.726311	
Adjusted R-squared	0.316943	S.D. dependent var	0.564235	
S.E. of regression	0.466325	Akaike info criterion	1.360060	
Sum squared resid	12.61260	Schwarz criterion	1.463873	
Log likelihood	-38.48183	Hannan-Quinn criter.	1.400745	
F-statistic	14.92022	Durbin-Watson stat	0.070837	
Prob(F-statistic)	0.000006			